

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

BKHIT BANTEN
2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA.2024 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).



Kepala Balai, 7 Februari 2024

IR TURHADI NOERACHMAN, M.SI
NIP196712061992031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Pengertian Rencana Kinerja	2
E. Yang Bertanggung Jawab Menyusun Rencana Kinerja Tahunan	2
F. Waktu Penyusunan	2
G. Mengapa Perlu Perencanaan Kinerja	2
H. Langkah-langkah Penyusunan	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	
A. Visi	4
B. Misi	4
C. Tujuan	5
D. Sasaran Program	5
E. Arah Kebijakan dan Strategi	6
BAB III PEMBANGUNAN KARANTINA PERTANIAN	
A. Sasaran Pembangunan BBKP Soetta	7
B. Skala Prioritas	7
BAB IV PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA	
A. Penetapan Sasaran	9
B. Penyusunan Program	10
C. Penyusunan Kegiatan	10
D. Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan	10
E. Penentuan Satuan Setiap Indikator	11
F. Menetapkan Target	12
G. Langkah-langkah dan Urutan Tindakan Dalam Mewujudkan Rencana Kinerja	12
BAB V PENUTUP	13
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten Tahun 2020-2024 sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Beberapa terobosan sangat diperlukan untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Terobosan-terobosan ini diperlukan untuk meningkatkan peran melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten telah melakukan reviu Rencana Strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten tahun 2020-2024 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 259/KPTS/RC.020/M/05/2020. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

Badan Karantina Pertanian, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor.43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN

Agar seluruh pejabat struktural dan fungsional mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. YANG BERTANGGUNG JAWAB MENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja disusun oleh masing-masing bidang dan bagian yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis

F. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima).

Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

G. MENGAPA PERLU PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah

satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

H. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mempelajari analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten memberikan dukungan terhadap pencapaian Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian dan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

A. VISI :

Visi Pembangunan Nasional 2020-2024 adalah “***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***”.

Visi Kementerian Pertanian adalah “***Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***”.

Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Visi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten (BARANTIN), yaitu: “***Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan***”.

B. MISI :

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dukungan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten terhadap pencapaian misi tersebut, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK),
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik .

C. TUJUAN :

Kebijakan pertanian dalam menjabarkan visi misi Kementerian Pertanian, bisa dilihat dalam tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian;

Tujuan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten adalah:

Tujuan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten memberikan dukungan terhadap Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Pertanian pada tahun 2020 – 2024 dalam penyelenggaraan perkarantinaan di wilayah kerja Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagai berikut :

1. Terjaganya sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK yang terkontaminasi melalui media pembawa HPHK dan OPTK yang

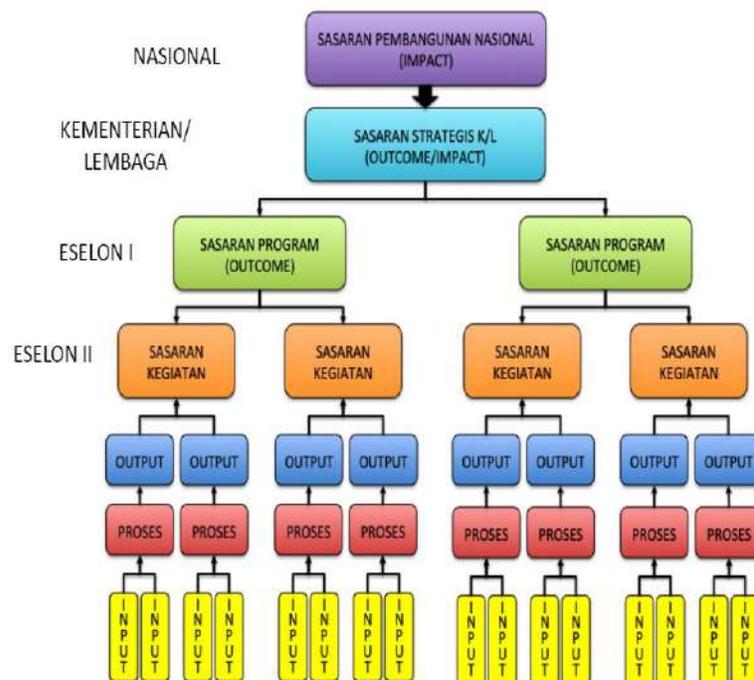
- dilalulintaskan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma serta dengan Indikator kinerja :
- a) Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran dengan target 14 jumlah temuan di tahun 2024.
 - b) Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan Karantina pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran dengan target 0 jumlah di tahun 2024.
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang dilalulintaskan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan indikator kinerja ;
- a) Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan sampai P21 dengan target 12 jumlah P21 yang diselesaikan di tahun 2024.
3. Terselenggaranya importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media pembawa HPHK dan OPTK yang dilalulintaskan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan indikator kinerja ;
- a) Jumlah komoditas pertanian yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan dengan target 338.152 sertifikasi impor di tahun 2024;
 - b) Jumlah komoditas pertanian Ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan dengan target 79.470 sertifikasi ekspor di tahun 2024;
4. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan di Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Bandara Halim perdana Kusuma dengan indikator kinerja :
- a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta dengan target 85,60 Nilai di tahun 2024.

5. Terwujudnya pelayanan prima karantina pertanian di Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan indikator kinerja :

a) Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten dengan target 90,93 di tahun 2024.

D. SASARAN PROGRAM :

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Karantina Pertanian dan melalui cascading Sasaran Kegiatan (IKSK) pada Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/ hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 21 tahun 2019, RPJP dan RPJMN Nasional serta Renstra Kementerian Pertanian, Sasaran Program (SP) dan indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten adalah:

1. SS 01. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional:
 - a. IKK.01. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti
 - b. IKK 02. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditindaklanjuti
 - c. IKK 03. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan.
 - d. IKK 04. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina
2. SS 02 Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif
 - a. IKK 05. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (dokumen registrasi pihak lain)
 - b. IKK 06. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (Dokumen permohonan registrasi oleh pihak lain)
 - c. IKK 07. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan
3. SS.03. Terwujudnya layanan Humas yang baik
 - a. IKK 08 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat
 - b. IKK 09. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. SS.04. Terwujudnya layanan Keuangan yang baik
 - a. IKK 10. Nilai Kinerja Anggaran Satker (BKHIT Banten)

5. SS.04.Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik
 - a. IKK 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (BKHIT Banten)

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantinaan. Upaya perlindungan terhadap produk pertanian dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK.

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK &OPTK yang selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS.

Perlindungan terhadap produk tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap

kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*notification of non-compliance*) di negara tujuan.

1. Memperkuat sistem perkarantinaan dan pengawasan keamanan berlandaskan analisa risiko untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan melalui strategi
 - a. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Informasi Perkarantinaan;
 - b. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
 - c. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
 - d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian;
 - e. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian;
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.
2. Mendorong akselerasi ekspor;
3. Penguatan Perkarantinaan di wilayah Perbatasan;
4. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina melalui strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang perkarantinaan.

BAB III PEMBANGUNAN KARANTINA PERTANIAN

A. SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka mencapai tujuan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka pencapaian sasaran pembangunan Badan Karantina Pertanian melalui **Tiga Pilar strategi penguatan yaitu 1) penguatan SDM, 2) penguatan Kelembagaan dan 3) Pengembangan Infrastruktur**

Penguatan tiga Pilar tersebut di atas didasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Tingkat resiko penyakit,
2. Frekuensi lalu-lintas media pembawa,
3. Lokasi/area merupakan daerah *remote*,
4. Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan perkarantinaan

B. SKALA PRIORITAS

Skala prioritas, penguatan 3 Pilar pembangunan dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas yaitu :

1. Penguatan Kelembagaan :
 - a. Tersedianya kebijakan teknis karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati
 - b. Tersedianya kebijakan kepatuhan, pengawasan, pengendalian, penindakan, kerjasama & informasi
 - c. Tersedianya standar pengujian karantina pertanian yang sesuai kebutuhan
 - d. Tersedianya uji terap tehnik dan metoda karantina pertanian yang sesuai kebutuhan
 - e. Peningkatan kualitas layanan uji standar karantina pertanian
 - f. Peningkatan kualitas pelayanan karantina, dan kepatuhan masyarakat

2. Penguatan SDM:

Terwujudnya ASN Karantina yang Profesional :

- a. Peningkatan kemampuan cegah tangkal HPHK & keamanan hayati hewani;
- b. Penguatan kompetensi tenaga fungsional karantina dan keilmuan pendukung: IT, Hukum, Kehumasan, diplomasi dan perundingan, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia
- c. Peningkatan deseminasi karantina pertanian

3. Pengembangan Infrastruktur/ Sarana/ Prasarana:

Prasarana dan sarana pendukung perkarantinaan melalui :

- a. Pengembangan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pemeriksaan, identifikasi dan deteksi HPHK/OPTK yang modern;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khususnya di PLBN, Papua dan Papua Barat.
- d. Pengembangan terhadap infrastruktur teknologi Informasi.

BAB IV PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Repeta dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Renja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

A. PENETAPAN SASARAN

1. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran:
 - a. Bila sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
 - b. Bila sasaran dan indikator sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

- c. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing, dengan penjelasan:
 - 1) Target adalah dapat berupa angka kuantitatif (jumlah) maupun angka kualitatif (prosentase);
 - 2) Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran. Indikator sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan.
- d. Dalam kolom keterangan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja lain.

B. PENYUSUNAN PROGRAM

- 1. Program-program yang dituangkan dalam Renja merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun program :
 - a. Bila program pada setiap sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka program dalam Renstra dapat dipindahkan dalam Renja;
 - B. Bila program yang ditetapkan pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih program yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

C. PENYUSUNAN KEGIATAN

1. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun kegiatan:
 - a. Berdasarkan skala prioritas melalui indikator kegiatan yang memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran dan tujuan;
 - b. Perlu adanya konsistensi, keterpaduan, dan keseimbangan antar satuan organisasi/kerja;
 - c. Memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada serta menyentuh kebutuhan pelayanan.

D. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan indikator untuk setiap kegiatan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *outputs*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
 - e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.
3. Penyusunan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dimaksud meliputi :
- a. Spesifik dan jelas;
 - b. Dapat diukur secara obyektif;
 - c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
 - d. Tidak bias.

E. PENENTUAN SATUAN SETIAP INDIKATOR

Indikator Kinerja dikategorikan dalam beberapa sudut pandang:

1. Berdasarkan keterkaitan dengan strategi organisasi:

*** Indikator Kinerja Strategis**

Indikator kinerja yang bersifat strategis adalah indikator kinerja yang terkait dengan strategi organisasi

*** Indikator Kinerja Non-Strategis**

Indikator kinerja yang tidak bersifat strategis digunakan untuk mengukur kegiatan rutin organisasi.

2. Berdasarkan aspek yang diukur

*** Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Hasil (*Result Indicator*)**

Result Indicator merupakan ukuran yang menunjukkan hasil dari proses kegiatan organisasi. Result Indicator merupakan "*lagging indicator*" indikator ini menunjukkan hasil akhir dari sekumpulan tindakan atau proses.

* Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Proses (*Performance Indicator*)

Performance Indicator merupakan indikator yang mengukur jalannya suatu proses atau tindakan yang mendukung organisasi dalam mencapai hasil.

F. MENETAPKAN TARGET

Setelah ditetapkan indikator kinerja dilanjutkan dengan menetapkan terget-target yang ingin dicapai untuk setiap indikator kinerja. Setelah persiapan-persiapan dalam langkah-langkah sebelumnya dilakukan, barulah bisa melakukan penetapan target.

Penetapan target kinerja bukanlah proses yang tiba-tiba atau proses yang bisa dilakukan secara mendadak. Penetapan target dapat realistis jika unit organisasi memiliki data yang cukup valid dan memadai.

G. LANGKAH-LANGKAH DAN URUTAN TINDAKAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA KINERJA :

1. Menyelenggarakan rapat staf/para pimpinan;
2. Negosiasi tingkat kinerja yang diinginkan;
3. Menuliskan rencana kinerja;
4. Meminta komitmen seluruh pimpinan unit kerja;
5. Penjelasan penetapan target.

Sebelum menetapkan target atau tingkat kinerja yang diinginkan, proses yang dilakukan harus mengakomodasi unit-unit kerja yang terkait, sehingga mereka dapat merasakan ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk pencapaian target-target tersebut. Penetapan target bukanlah hanya membicarakan soal angka, akan tetapi lebih mendalam lagi sampai kepada latar belakang munculnya angka tersebut. Setiap angka target yang dimunculkan harus dikaitkan kepada pencapaian visi dan misi unit organisasi. Penetapan target tidak boleh dipaksakan karena akan dapat menimbulkan beban yang berat bagi penerimanya. Target yang ditetapkan perlu diperhatikan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal itu perlu dilakukan rapat-rapat atau koordinasi.

Perumusan rencana kinerja dapat didokumentasikan dalam suatu formulir yang memberikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran. Dokumen rencana kinerja merupakan dokumen yang dianjurkan oleh pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk formulir terlampir.

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2024.

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten Tahun 2023 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu. Mengingat proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul, maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan.

Lampiran Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan/ Sasaran/ Indikator Kinerja	Target
	2024
1	2
Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten	
Sasaran Kegiatan 01. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	
IKSK.01.1 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3,00
IKSK.01.2 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3,00
IKSK.01.3 Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	147.984
IKSK.01.4 Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	29.000
Sasaran Kegiatan 02. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	
IKSK.02.1 Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (Dokumen registrasi pihak lain)	50
IKSK.02.2 Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (Dokumen permohonan registrasi oleh pihak lain)	50
IKSK.02.3 Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (Dokumen P21 atau SP3)	0
Sasaran Kegiatan 03. Terwujudnya layanan Humas yang baik	
IKSK 03.1 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	3
IKSK 03.2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81Nilai	81
Sasaran Kegiatan 04. Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	
IKSK 04.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten	81
Sasaran Kegiatan 05. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	
IKSK 05.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81

MATRIKS ANGGARAN TA 2024
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN BANTEN

Kode	Uraian	SD	Pagu	JADWAL PALANG REALISASI 2024 BANTEN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
127.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		50.808.436.000	0	0	4.609.703.876	5.116.568.811	3.877.961.022	5.314.886.042	4.555.616.607	5.466.739.928	5.466.739.928	5.466.739.928	5.466.739.928	5.466.739.928
7003	Penyelenggaraan Layanan Karantina		11.755.337.000	0	0	321.289.236	948.031.639	505.527.816	1.425.784.044	1.222.100.609	1.466.520.731	1.466.520.731	1.466.520.731	1.466.520.731	1.466.520.731
7003.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]														
7003.CAG.950	Sarana Karantina														
914	Sarana laboratorium dan teknis lapangan														
XA	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung (Kandang Anjing Besar, Kandang Anjing Kecil, Kandang Kucing, Kandang Kuda, Laboratorium KH)														
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PNP													
XB	Pengadaan Perlengkapan Pengolah Data (Pelayanan IKH, IKJ dan IKT)														
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PNP													
XC	Pengadaan Alat Laboratorium														
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PNP													
7003.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]		9.001.582.000	0	0	319.589.236	927.831.769	427.258.158	1.046.700.405	897.171.776	1.076.606.131	1.076.606.131	1.076.606.131	1.076.606.131	1.076.606.131
7003.PDC.501	Hasil Pemantauan		2.517.440.000	0	0	0	0	0	359.634.286	308.257.959	369.909.551	369.909.551	369.909.551	369.909.551	369.909.551
511	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan		1.493.290.000	0	0	0	0	0	213.327.143	182.851.837	219.422.204	219.422.204	219.422.204	219.422.204	219.422.204
AA	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK		78.500.000	0	0	0	0	0	11.214.286	9.612.245	11.534.694	11.534.694	11.534.694	11.534.694	11.534.694
521211	Belanja Bahan	PNP	52.500.000	0	0	0	0	0	7.500.000	6.428.571	7.714.286	7.714.286	7.714.286	7.714.286	7.714.286
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PNP	26.000.000	0	0	0	0	0	3.714.286	3.183.673	3.820.408	3.820.408	3.820.408	3.820.408	3.820.408
AB	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK		164.050.000	0	0	0	0	0	23.435.714	20.087.755	24.105.306	24.105.306	24.105.306	24.105.306	24.105.306
521211	Belanja Bahan	PNP	50.000.000	0	0	0	0	0	7.142.857	6.122.449	7.346.939	7.346.939	7.346.939	7.346.939	7.346.939
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PNP	114.050.000	0	0	0	0	0	16.292.857	13.965.306	16.758.367	16.758.367	16.758.367	16.758.367	16.758.367
AC	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK		9.070.000	0	0	0	0	0	1.295.714	1.110.612	1.332.735	1.332.735	1.332.735	1.332.735	1.332.735
521211	Belanja Bahan	PNP	9.070.000	0	0	0	0	0	1.295.714	1.110.612	1.332.735	1.332.735	1.332.735	1.332.735	1.332.735
AD	Seminar Pemantauan Tk Regional Daerah Sebar HPHK		19.300.000	0	0	0	0	0	2.757.143	2.363.265	2.835.918	2.835.918	2.835.918	2.835.918	2.835.918

524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	RM	4.400.000	0	0	0	0	0	2.190.650	315.621	270.533	324.639	324.639	324.639	324.639	324.639
AB	Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Semester II TA 2023, Semester I dan Trwulan III TA 2024		20.380.000	0	0	0	0	5.820.571	0	2.079.918	1.782.787	2.139.345	2.139.345	2.139.345	2.139.345	2.139.345
521211	Belanja Bahan	RM	5.000.000	0	0	0	0	0	0	714.286	612.245	734.694	734.694	734.694	734.694	734.694
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	RM	6.380.000	0	0	0	0	0	0	911.429	781.224	937.469	937.469	937.469	937.469	937.469
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	RM	9.000.000	0	0	0	0	5.820.571	0	454.204	389.318	467.181	467.181	467.181	467.181	467.181
AC	Mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data PNBK Barantan Terkait SAI		15.200.000	0	0	0	0	0	0	2.171.429	1.861.224	2.233.469	2.233.469	2.233.469	2.233.469	2.233.469
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	RM	8.200.000	0	0	0	0	0	0	1.171.429	1.004.082	1.204.898	1.204.898	1.204.898	1.204.898	1.204.898
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	RM	7.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	857.143	1.028.571	1.028.571	1.028.571	1.028.571	1.028.571
171	Pengelolaan penerimaan negara		19.840.000	0	0	0	0	0	2.200.000	2.520.000	2.160.000	2.592.000	2.592.000	2.592.000	2.592.000	2.592.000
AA	Optimalisasi Pengelolaan PNBK (Pemanfaatan Kelebihan PNBK)		17.640.000	0	0	0	0	0	0	2.520.000	2.160.000	2.592.000	2.592.000	2.592.000	2.592.000	2.592.000
521211	Belanja Bahan	RM	4.500.000	0	0	0	0	0	0	642.857	551.020	661.224	661.224	661.224	661.224	661.224
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	RM	4.140.000	0	0	0	0	0	0	591.429	506.939	608.327	608.327	608.327	608.327	608.327
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	RM	9.000.000	0	0	0	0	0	0	1.285.714	1.102.041	1.322.449	1.322.449	1.322.449	1.322.449	1.322.449
AB	Penyusunan dan Pembahasan Usulan Target Pagu PNBK TA 2024		2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	RM	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0



Tangerang, 7 Februari 2024

Tanda Mendatangani
K. Balai BKHIT Bantén

IP TURHADI NOERACHMAN, M.Si
NIP196712061992031001